|  |  |
| --- | --- |
| KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  DAERAH KALIMANTAN TIMUR  DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS |  |



**HUBUNGAN DAN TATA CARA KERJA**

**SUBDIT TIPIDKOR**

**DITRESKRIMSUS POLDA KALTIM**

### BAB I

#### PENDAHULUAN

**1.** **Umum.**

1. Subdit Tipikor Polda Kaltim adalah unsur pelaksana pada Polda Kaltim yang bertugas dalam menjalankan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan target dan sasaran yang ditentukan.
2. Agar pelaksanaan tugas tersebut diatas dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan piranti lunak/perangkat yang mengatur hubungan dan tata kerja antar unit kerja/pejabat unsur-unsur Subdit III Tipidkor Polda Kaltim maupun unit kerja/pejabat lainnya secara vertikal, horisontal, dan lintas fungsi maupun lintas sektoral.
3. Melalui hubungan dan tata cara kerja pada Subdit III Tipidkor Polda Kaltim diatur mengenai wewenang dan tanggung jawab serta hubungan dan tata cara kerja masing-masing unit kerja/pejabat, sekaligus diatur juga dengan siapa harus bekerja sama dan kepada siapa harus bertanggung jawab.

/ d. Pokok-pokok …..

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |

d. Pokok-pokok hubungan dan tata cara kerja pada Subdit III Tipidkor Polda Kaltim ini disusun dengan menggunakan pendekatan sistem dan manajemen dimana keterpaduan antar unit kerja/pejabat yang menyelenggarakan tugasnya sangat diperlukan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai kebijaksanaan Pimpinan.

1. Dasar.
2. Undang-undang RI No. 2 / 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/22/IX/2010 tanggal 28 September 2010, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.
4. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 23 / IX / 2010, tanggal 30 September 2010, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.
5. Keputusan Kapolri Nomor: Kep/425/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang pedoman cara penyusunan Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) dilingkungan Polri.
6. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud.

Hubungan Tata Cara Kerja disusun dengan maksud untuk dijadikan pedoman kerja bagi pada Subdit III Tipidkor Polda Kaltim sehingga mekanisme dan pelaksanaan tugas dapat terlaksana dengan baik dan benar serta terjalinnya hubungan kerja sama yang baik dan benar dengan Satker lain di Jajaran Polda Kaltim dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus dengan instansi lain (Non Polri) yang mempunyai hubungan koordinasi guna peningkatan pelaksanaan tugas pokok fungsi untuk menghindari terjadinya tumpang tindih atau penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugas.

1. Tujuan.

Agar tercipta hubungan yang kondusif, tertib dan harmonis didalam pelaksanaan tugas baik dalam lingkungan Subdit III Tipidkor sendiri dan dengan Internal Polri maupun dengan eksternal (instansi lain) diluar institusi Polri..

/4. Ruang Lingkup….

|  |  |
| --- | --- |
| 3 |  |

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Hubungan Tata Cara Kerja dilingkungan Subdit III Tipidkor Polda Kaltim mencakup tata cara / mekanisme/metode kerja dilingkungan Intern Polri dan Lintas Sektoral dengan Instansi terkait yang sangat erat hubungan koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas yang disesuaikan dengan tugas pokok penyidikan di lingkungan Subdit III Tipidkor Polda Kaltim.

5. Tata Urut.

BAB I : PENDAHULUAN

1. Umum

2. Dasar

3. Maksud dan tujuan

4. Ruang Lingkup

5. Tata Urut

6. Pengertian

BAB II : TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Unsur Pimpinan

2. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf

BAB III : POKOK POKOK HTCK

1. Hubungan Internal

2. Hubungan Eksternal

3. Hubungan Diagonal

3. Hubungan Lintas Sektoral

BAB IV : PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

BAB V : PENUTUP

**6. Pengertian**

a. **Hubungan** adalah perwujudan yang saling berkaitanantar komponen/unsur-unsur pengembangan fungsi dalam suatu organisasi;

b. Tata Cara Kerja, adalah aturan-aturan yang harus diikuti dalam melaksanakan kerja dilingkungan organisasi sesuai dengan struktur dan hubungan fungsional antar komponen/unsur-unsur dalam organisasi Subdit III Tipidkor Polda Kaltim;

/c. Hubungan…

|  |  |
| --- | --- |
| 4 |  |

c. Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) adalah suatu prosedur yang mengatur tentang mekanisme hubungan kerja antar komponen/unsur-unsur pengemban fungsi dilingkungan Subdit III Tipidkor Polda Kaltim dengan unsur-unsur pengemban fungsi dilingkungan organisasi atau lembaga Pemerintah Non Polri yang dilaksanakan secara sistematis, transparan, proporsional, koordinatif, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mencapai tujuan yang diinginkan;

d. Subdit III Tipidkor adalah suatu organisasi yang berada dibawah naungan Dit Reskrimsus Polda Kaltim untuk membidangi tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus khusus yang bertanggung jawab kepada Dir Reskrimsus;

d. Unit organisasi adalah organisasi Subdit III Tipidkor Polda Kaltim yang dijabat oleh Kasubdit;

e. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Subdit adalah salah satu pengguna anggaran/barang yang berada di lingkungan Polda Kaltim;

f. Tugas adalah sekelompok kegiatan yang harus dikerjakan oleh satuan organisasi;

g. Tugas Pokok adalah sekumpulan kegiatan yang ada dan menjadi tanggung jawab dalam suatu organisasi.

**BAB II**

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

**1. Unsur Pimpinan**

Subdit III Tipidkor dipimpin oleh seorang Kasubdit yang bertanggung jawab kepada Dit Reskrimsus, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Dir Reskrimsus Polda Kaltim disamping tugas Pokok sebagai berikut :

Menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping tugas Pokok Subdit III Tipidkor mempunyai tugas fungsi sebagai berikut :

1. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah Hukum Polda Kaltim;

/b…memberikan…

|  |  |
| --- | --- |
| 5 |  |

1. memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi Reserse Korupsi di jajaran Polda Kaltim;
2. memberikan back up penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Satuan wilayah  Jajaran Polda Kaltim; dan
3. melaksanakan operasi khusus sesuai perintah Direktur Reserse Kriminal Khusus.

**2. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf**

a. Unit Tipidkor

* Unit I, mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dibidang : Korupsi Dana Usaha Negara dan Dana Pemerintah yang terjadi diwilayah hukum Polda Kaltim;
* Unit II, mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dibidang : Korupsi Dana Kredit Usaha;
* Unit III, mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dibidang Korupsi Dana Bantuan; dan
* Unit IV, mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dibidang  Korupsi Dana Pembangunan dan Proyek
  1. Banum Subdit III Tipidkor

Banum Subdit III Tipikor nmempunyai tugas menghimpun data dan menghimpun surat masuk dan keluar.

**BAB III**

**POKOK-POKOK HTCK**

**1. Hubungan Vertikal**

**a. Hubungan Internal**

Dalam hubungan Internal merupakan keterkaitan langsung tegak lurus dari atas kebawah yaitu antar unsur pimpinan kepada unsur pembantu pimpinan dan pelaksana tugas pokok sebagai berikut :

**1). Kasubdit Tipikor dengan Unit**

Kasubdit Tipikor selaku Pimpinan di Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kaltim yang dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh Unit dan bertanggung jawab kepada Kasubdit Tipikor, berlaku HTCK sebagai berikut :

/a) Bidang Administrasi…

|  |  |
| --- | --- |
| 6 |  |

a). Bidang Administrasi.

(1) Kasubdit Tipikor Polda Kaltim memberikan arahan dan petunjuk berupa keputusan / kebijaksanaan, dalam rangka penyusunan, perumusan, penyajian produk-produk perencanaan serta tata cara pelaksanaannya, baik melalui disposisi, bertatap muka langsung maupun rapat.

(2) Unit menindak lanjuti dan menjabarkan kebijaksanaan tersebut dalam bentuk pembuatan produk dibidang operasional, pembinaan serta piranti lunak yang mengatur dan bersifat baku untuk dipedomani oleh seluruh komponen Jajaran Polda Kaltim.

b) Bidang Pembinaan.

(1) Kasubdit Tipikor Polda Kaltim menetapkan arah dan petunjuk berupa keputusan dan kebijaksanaan terhadap program pembinaan baik yang menyangkut sistem, metode dan prosedur maupun pembinaan personil, logistik dan anggaran.

(3) Hal-hal rutin yang tidak prinsipil sifatnya, Unit Tipikor Polda Kaltim dapat mengambil inisiatif, berpedoman kepada ketentuan dan kebijaksanaan sebelumnya serta materi yang ada, selanjutnya melaporkan kepada Kasubdit Tipikor Polda Kaltim pada kesempatan pertama.

(4) Dalam hal pelaksanaan kebijaksanaan Kasubdit Tipikor Polda Kaltim yang kemudian terdapat perkembangan atau hal-hal yang berakibat khusus dan prinsipil, Unit Tipikor wajib membicarakan dengan Kasubdit Tipikor atas persetujuan Kasubdit Tipikor perkembangan atau hal-hal tersebut dapat dibahas kembali, dilaporkan kepada Dir Reskrimsus atau langsung diputuskan pemecahannya.

/c) Bidang Korespondensi…

|  |  |
| --- | --- |
| 7 |  |

c) Bidang Korespondensi.

(1) Kasubdit Tipikor menetapkan pedoman dan kriteria korespondensi yang dapat langsung ditangani oleh Unit Tipidkor langsung diteruskan kepada Banit mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dan pengendalian operasional.

(2) Apabila para Unit mengajukan saran dan pendapat tentang masalah-masalah operasional. Setelah dibahas bersama / diputuskan oleh Kasubdit Tipikor, maka wajib dilaksanakan oleh seluruh personel Subdit III Tipidkor Polda Kaltim.

**2) Kasubdit Tipikor dengan Banum Subdit Tipidkor .**

Bidang Administrasi.

(1) Banum menyampaikan laporan, telaahan tugas, informasi bidang operasional maupun pembinaan;

(2) Kasubdit Tipidkor dapat merevisi dan memberi pengarahan terhadap prroduk-produk tersebut apabila diperlukan

1. **Hubungan Eksternal**

Subdit Tipidkor berdasarkan sifat hubungan/ keterkaitan kerja secara langsung dari atas ke bawah dalam pelaksanaan tugas pokok bersifat perintah dan pengendalian serta sebaliknya yang bersifat dari bawah ke atas bersifat menerima perintah dan laporan, yaitu antara lain dengan ;

**1) dengan Kaba Reskrim Polri.**

a) menjabarkan kebijaksanaan yang bersifat perintah maupun petunjuk dan arahan dari Kaba Reskrim Polri kepada Satuan Kewilayahan;

b) menyusun Rencana Operasi Mandiri Kewilayahan dan dikirim kepada Kaba Reskrim Polri untuk mohon persetujuan;

c) mengirim laporan bulanan;

d) melaporkan Rencana dan kesiapan, serta hasil anev pelaksanaan kegiatan Subdit Tipidkor;

e) melaporkan pelaksanaan semua arahan dan petunjuk Kabareskrim Polri dibidang Administrasi dan Operasional.

/2)Kapolda Kaltim..

|  |  |
| --- | --- |
| 8 |  |

**2) Kapolda Kaltim.**

a) melaksanakan dan menjabarkan semua kebijakan serta perintah/petunjuk Kapolda Kaltim di bidang Operasional (pelaksanaan Juklap, Protap) dan administrasi (dalam bentuk pembuatan Proja, Jukmin. Tulisan dinas) dan sebagainya yang didistribusikan kepada Satuan fungsi maupun Satuan Kewilayahan;

b) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyelidikan, penyidikan tindak pidana korupsi, dan kegiatan operasional lainnya sesuai dengan tugas pokoknya;

c) melaporkan rencana gelar bulanan, triwulan, tahunan maupun insidentil;

d) melaporkan hasil anev Mingguan, Bulanan dan Tahunan tentang pelaksanaan tugas pokok;

e) menerima petunjuk dan perintah dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian tugas penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana korupsi;

**3) Waka Polda Kaltim**

a) melaporkan kebijaksanaan Kapolda kaltim mengenai tugas Direktorat Reskrimsus untuk mohon petunjuk dan arahan;

b) melaporkan kasus menonjol yang ditangani oleh Direktorat Reskrimsus dan Satuan Kewilayahan.

1. Hubungan Horizontal
2. Hubungan Internal
3. Subdit Tipidkor dengan Sub Bagrenmin

Dengan Sub Bagrenmin berkoordinasi dalam hal:

1. Penyusuanan kebutuhan anggaran, personel dan Sarpras dalam proses tugas penyelidikan dan penyidikan;
2. Penerapan manajemen anggaran serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus dibidang Korupsi
3. **Subdit Tipidkor dengan Bag Bin Opsnal**

Dengan Bag Bin Opsnal berkoordinasi dalam hal ;

1. melaksanakan pembinaan melalui analisis dan gelar perkara beserta penanganannya;

/b) berkoordinasi...

|  |  |
| --- | --- |
| 9 |  |

1. berkoordinasi dalam melakukan pengkajian efektifitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana Korupsi;
2. berkoordinasi dalam penyelenggaraan pelatihan fungsi;
3. mendukung penghimpunan Berkas perkara dan dokumentasi kegiatan Subdit Tipidkor.
4. **Subdit Tipidkor dengan Bag Wassidik**

Dengan Bag Wassidik berkoordinasi dalam hal :

1. Memberikan bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi;
2. Memberikan bantuan teknis dalam pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi;
3. Menyelenggarakan kegiatan gelar perkara terhadap kasus tindak pidana korupsi;
4. Kerjasama dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi;
5. Berkoordinasi penanganan pengaduan masyarakat tentang proses penyidikan dan permasalahan tindak pidana korupsi.
6. Dalam hal pengawasan penyidikan antara Pengawas dengan Penyidik Subdit Tipidkor HTCK berlaku sebagai berikut :

(1) Pengawasan dalam melakukan pengawasan terhadap penyidik setelam menerima Surat perintah tugas dari atasan penyidik;

(2) Penyidik dapat mengajukan keberatan terhadap kegiatan pengawasan diluar sasaran pengawasan;

1. **Subdit Tipidkor dengan Sub Direktorat Reskrimsus**

Berdasarkan sifat hubungan kerja di lingkungan Direktorat Reskrimsus menjalin keterkaitan kerja dalam rangka koordinasi antar Subdit I/Indagsi, Subdit II/PPUKDM dan Subdit IV/Tipid Ter dalam hal :

1. menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

/b) pemberkasan...

|  |  |
| --- | --- |
| 10 |  |

1. Pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
2. Penerapan manajemen anggaran serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
3. **Hubungan Eksternal**

Subdit Tipidkor berdasarkan sifat hubungan / keterkaitan kerja secara langsung dan sejajar / mendatar antar komponen atau unsur Pelaksana Tugas Pokok dalam rangka melaksanakan koordinasi, yaitu dalam bentuk:

1. **SPKT**
2. Berkoordinasi dengan Subdit Tipidkor dalam rangka memberikan pelayanan prima untuk menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat;
3. Koordinasi dalam menindak lanjuti laporan/ pengaduan masyarakat, baik melalui telepon, jejaring sosial, pesan singkat maupun secara langsung kepada Subdit Tipidkor.
4. **Dit Intelkam Polda Kaltim**
5. Memberikan informasi A1 kepada Subdit Tipidkor berhubungan dengan kegiatan yang menyangkut tindak pidana korupsi untuk dilakukan penindakan;
6. Membantu memberikan laporan berupa Perkiraan Khusus dalam rangka penyelenggraan operasi Kepolisian, dan Perkiraan Cepat apabila ada perubahan TO dalam pelaksanaan operasi tersebut;
7. Memberikan tembusan hasil kegiatan deteksi dini maupun hasil pelaksanaan operasi intelijen yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi di wilayah Polda Kaltim.
8. **Dit Reskrimum Polda Kaltim**
9. Saling memberikan informasi berkaitan dengan terjadinya TP di jajaran Polda Kaltim dari informasi yang diperoleh di Lapangan;
10. Bekerjasama di lapangan dalam hal kegiatan upaya paksa terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada saat situasi mendesak membutuhkan bantuan personel;

/c) saling...

|  |  |
| --- | --- |
| 11 |  |

1. Saling memberikan masukan berkaitan dengan teknis penyelenggaraan penyelidikan maupun penyidikan terhadap suatu tindak pidana;
2. Subdit Tipidkor dapat meminta bantuan operasional dengan menyertakan Ren Ops atau rincian permintaan untuk penentuan kekuatan, peralatan ( Alut / Alsus ) dan dukungan logistik yang diperlukan bagi terselenggaranya bantuan tersebut secara cepat dan tepat serta berdaya guna, dan pelaksanaan bantuan kekuatan yang mendesak dan mendadak
3. **Dit Resnarkoba Polda Kaltim**
4. Saling memberikan informasi berkaitan dengan terjadinya TP di jajaran Polda Kaltm dari informasi yang diperoleh di Lapangan;
5. Bekerjasama di lapangan dalam hal kegiatan upaya paksa terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada saat situasi mendesak membutukan bantuan personel.
6. Saling memberikan masukan berkaitan dengan teknis penyelenggaraan penyelidikan maupun penyidikan terhadap suatu tindak pidana
7. Subdit Tipidkor Dit Reskrimsus dapat meminta bantuan operasional dengan menyertakan Ren Ops atau rincian permintaan untuk penentuan kekuatan, peralatan ( Alut / Alsus ) dan dukungan logistik yang diperlukan bagi terselenggaranya bantuan tersebut secara cepat dan tepat serta berdaya guna, dan pelaksanaan bantuan kekuatan yang mendesak dan mendadak
8. **Sat Brimob Polda Kaltim**
9. Saling memberikan informasi berkaitan dengan terjadinya TP di jajaran Polda Kaltim dari informasi yang diperoleh di Lapangan;
10. Berkoordinasi dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Polda Kaltim.

/6) Dit Binmas Polda Kaltim….

|  |  |
| --- | --- |
| 12 |  |

1. **Dit Binmas Polda Kaltim**
2. berkoordinasi dalam hal pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.
3. berkoordinasi dalam rangka menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan dalam rangka memberikan pemahaman tentang tindak pidana korupsi, dengan sasaran kelompok masyarakat sekitar kawasan hutan, Nelayan, Petani, Buruh/ TKI yang rentan bersinggungan dengan Tindak pidana khusus;
4. melaksanakan kerja sama dalam rangka penyampaian informasi kepada masyarakat tentang kegiatan Operasional;
5. melaksanakan koordinasi dalam rangka pengumpulan pendapat/ harapan-harapan masyarakat tentang permasalahan yang berkaitan tindak pidana korupsi.
6. **Dit Sabhara Polda Kaltim**
7. memberikan informasi berkaitan dengan terjadinya terjadinya tindak pidana khusus yang terjadi di wilayah hukum Polda Kaltim;
8. berkoordinasi dalam pelibatan personel guna pelaksanaan operasi-operasi dalam rangka pencegahan maupun penindakan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi;
9. berkoordinasi dalam pelibatan personel dalam rangka pengamanan dan pengawalan barang bukti/ perlindungan Saksi/ Tersangka/ TKP/ kegiatan penyidikan/ Penyidik/ Jaksa/ Hakim sesuai ketentuan perundang-undangan maupun kebutuhan kelangsungan proses penyidikan tindak pidana korupsi yang ditangani Subdit Tipidkor.
10. melaksanakan koordinasi untuk keterpaduan sistim metode, operasional dan peningkatan kemampuan dalam rangka penyidikan kasus besar / yang melibatkan massal, yang ditangani Subdit Tipidkor.
11. **Dit Lantas Polda Kaltim**
12. berkoordinasi dalam pelibatan personel Dit Lantas untuk melakukan operasi di jalan raya dengan sasaran orang maupun kendaraan yang digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana korupsi;
13. berkoordinasi dalam hal kepemilikan/ identitas kendaraan yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana korupsi.

/9) Dit Pam Ovit Polda Kaltim....

|  |  |
| --- | --- |
| 13 |  |

1. **Dit Pam Ovit Polda Kaltim**
2. Memberikan informasi berkaitan dengan terjadinya tindak pidana korupsi yang terjadi dilingkungan Obyek vital dijajaran Polda kaltim;
3. Berkoordinasi dalam pelibatan personel Dit Pam Ovit dalam operasi di lingkungan Obyek vital, baik dalam penindakan maupun pengamanan barang bukti tindak pidana korupsi;
4. Berkoordinasi dengan petugas yang ditugaskan dilingkungan perusahaan dalam rangka kegiatan penindakan pelaku tindak pidana korupsi.
5. berkoordinasi dalam pelibatan personel dalam rangka pengamanan dan pengawalan barang bukti/ perlindungan Saksi/ Tersangka/ kegiatan penyidikan dengan TKP atau melibatkan lingkungan Obyek Vital.
6. **Dit Polair Polda Kaltim**
7. berkoordinasi dalam rangka pelibatan personel Dit Polair dalam operasi/ penegakan hukum tindak pidana korupsi yang terjadi diwilayah perairan yang merupakan wilayah hukum Polda Kaltim;
8. berkoordinasi dalam rangka pembinaan, bantuan dan bimbingan tehnis penyidikan tindak pidana korupsi oleh Penyidik Dit Polair;
9. Direktorat Kepolisian Perairan memberikan masukan tentang analisa dan perkembangan tindak pidana korupsi dan potensi gangguan yang terjadi diwilayah perairan yang merupakan wilayah hukum Polda Kaltim sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam perencanaan operasi, baik operasi Kepolisian dibidang tindak pidana korupsi.
10. **Dit Tahti Polda Kaltim**
11. berkoordinasi masalah tehnis penitipan/ penyerahan, dan Bon tahanan serta pengeluaran Tahanan;
12. berkoordinasi dalam rangka memberikan petunjuk tata tertib penahanan, yang meliputi pemeriksaan fasilitas ruang Tahanan secara berkala, mengendalikan dan memonitor jumlah Tahanan serta pelaporan jumlah Tahanan;
13. berkoordinasi tentang pemeliharaan, perawatan dan pembinaan Tahanan tindak pidana korupsi;

d) berkoordinasi...

|  |  |
| --- | --- |
| 14 |  |

1. berkoordinasi masalah penyerahan, penerimaan barang bukti dari penyidik Subdit Tipidkor, pengamanan, perawatan dan pengawasan serta administrasi Barang bukti hasil kejahatan tindak pidana korupsi;
2. membuat laporan daftar Barang bukti ke Dit Tahti sebagai sarana pengawasan dan pengendalian;
3. berkoordinasi masalah pinjam pakai, pengeluaran dan pemusnahan barang bukti;
4. Bentuk Diagonal

Subdit Tipidkor berdasarkan sifat hubungan/keterkaitan kerja secara tidak langsung antar komponen/ unsur-unsur dalam satu organisasi (tidak vertikal dan tidak horizontal) yang bersifat koordinasi dengan unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/ Pelayanan, yaitu dengan :

1. **Itwasda Polda Kaltim**
2. berkoordinasi dalam pelaksanaan Wasrik rutin, Wasrik khusus dan verifikasi terhadap kegiatan manajerial yang meliputi; proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian program kerja serta pengelolaan dan administrasi anggaran dan perbendahharaan di Subdit Tipidkor;
3. mengirimkan tembusan semua produk-produk Subdit Tipidkor maupun surat menyurat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta peranan Subdit Tipidkor.
4. menindak lanjuti hasil temuan wasrik maupun verifikasi ysng dilakukan oleh jajaran inspektorat pengawasan daerah.
5. **Ro Ops Polda Kaltim**
6. berkoordinasi dalam rangka pembinaan manajemen operasional Kepolisian kepada Subdit Tipidkor berhubungan dengan penyelenggaraan perencanaan, administrasi dan pengendalian operasi Kepolisian serta tindakan kontijensi;
7. membantu penyelenggaraan manajemen pelatihan Pra operasi, khususnya operasi Kepolisian yang diselengarakan untuk penegakan hukum tindak pidana korupsi;
8. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Biro Operasional sesuai dengan Surat perintah yang dikeluarkan dalam kegiatan maupun operasi Kepolisian.
9. **Ro Rena Polda Kaltim**
10. memberikan pembinaan berhubungan dengan fungsi perencanaan umum dan anggaran;
11. membantu dan monitoring dan memberikan evaluasi pelaksanan program dan anggaran serta penerapan sistem dan manajemen organisasi;

/c. Membimbing...

|  |  |
| --- | --- |
| 15 |  |

1. membimbing penerapan Reformasi Birokrasi Polri 9RBP);
2. membantu dalam rangka penyusunan Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, Penetapan Kinerja, LAKIP, pembuatan TOR dan RAB serta POK (Petunjuk Operasional Kegiatan).
3. **Ro SDM Polda Kaltim**
4. membantu pelayanan kepada personel dalam hal pembinaan karier yang meliputi : Assesment, Mutasi, pengangkatan dan pemberhentian jabatan, serta kepangkatan;
5. pembinaan kesejahteraan personel yang meliputi : pembinaan Rohani dan mental, Jasmani, serta kesejahteraan moril maupun materiil, termasuk pemberian ijin dan cuti;
6. memberikan pembinaan psikologi, yang terdiri dari psikologi Kepolisian dan psikologi Personel;
7. mengirimkan laporan data normatif dan kekuatan riil personel sebagai bahan anev berhubungan dengan kekuatan personel.
8. **Ro Sarpras Polda Kaltim**
9. memberikan pembinaan berhubungan dengan kebutuhan sarana dan prasarana;
10. berkooordinasi dan memberikan batuan teknis tentang perencanaan, pengadministrasian dan penatausahaan SIMAK BMN dan Keuangan;
11. berkoordinasi dalam rangka menginventarisasi seluruh materiil logistik dan aset yang dimiliki dan penghapusannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
12. **Bid Propam Polda Kaltim**
13. membantu melakukan pembinaan dan pengamanan internal, yang meliputi personel, materiil, kegiatan dan bahan keterangan;
14. berkoordinasi dalam rangka menyelenggarkan pembinaan dan penegakan disiplin dan/ atau kode etik profesi Polri;
15. memberikan pelayanan dalam rangka penelitian personel sebagai persyaratan UKP (Usulan Kenaikan Pangkat);
16. berkoordinasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berhubungan dengan pengaduan masyarakat terhadap kinerja Personel.
17. **Bid Humas Polda Kaltim**
18. memberikan pembinaan terhadap kegiatan kehumasan;
19. memberikan data-data pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencegahan dan penberantasan tinda pidana korupsi untuk pemberitaan di mess media;

/c) mengkoordinasikan...

|  |  |
| --- | --- |
| 16 |  |

1. mengkoordinasikan tugas pokok PPID (Petugas Pengelola Informasi dan data) dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan.
2. **Bid Hukum Polda Kaltim**
3. memberikan pemahaman dan pembinaan hukum dan HAM
4. berkoordinasi dalam rangka mensosialisasikan UU yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi;
5. memberikan masukan berkaitan dengan penerapan hukum, pemberian nasehat dan pertimbangan hukum serta memberikan bantuan hukum bila ada permasalahan dalam penanganan tindak pidana korupsi dari masyarakat.
6. **Bid TI Polri Polda Kaltim**
7. mengkoordinasikan pembangunan, pembinaan, pemeliharaan jaringan komunikasi dan data serta pelayanan telekomunikasi
8. memberikan bimbingan, bantuan teknis tentang komunikasi, baik masalah Hardware maupun Software.
9. membina dan menyelenggarakan pusat sistem informasi kriminal yang meliputi penyiapan data dan penyajian data serta statistik kriminal.
10. **Yanma Polda Kaltim**
11. berkoordinasi dalam rangka memberikan bimbingan teknis tentang pelaksanaan pelayanan Markas atau Kantor;
12. memberikan pelayanan markas, fasilitas perkantoran, dukungan komunikasi dan elektronik serta pemakaman
13. memberikan pelayanan berkaitan dengan penerbitan Kartu Ijin pemegang Senpi, penyediaan tempat tinggal/ asrama;
14. berkoordinasi dalam rangka keterlibatan yang terlibat pengamanan khusus.

Subdit Tipidkor berdasarkan sifat hubungan/ keterkaitan kerja secara tidak langsung antar komponen/ unsur-unsur dalam satu organisasi (tidak vertikal dan tidak horizontal) yang bersifat koordinasi dengan unsur-unsur pendukung, yaitu dengan ;

1. **SPN Polda Kaltim**
2. berkoordinasi dalam rangka penyusunan kurikulum bahan pengajaran, kesiapan dan pelaksanaan pendidikan pelatihan yang meliputi perencanaan, pengadministrasian, pelaksanaan dan pengendalian pendidikan dan latihan berkaitan dengan peningkatan SDM, baik secara langsung maupun melalui Ro SDM;

/b) menyiapkan..

|  |  |
| --- | --- |
| 17 |  |

1. menyiapkan tenaga pendidik/ Instruktur dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, maupun latihan peningkatan kemampuan personel jajaran.
2. **Bid Dokes Polda Kaltim**
3. Berkoordinasi dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan, pembinaan kesehatan kesamaptaan, dan materiil fasilitas kesehatan;
4. Membatu proses pemberian restitusi kesehatan bagi angota/ personel yang menderita sakit;
5. Subdit Tipidkor berdasarkan sifat hubungan/ keterkaitan kerja secara tidak langsung antar komponen / unsur-unsur dalam satu organisasi (tidak vertikal dan tidak horizontal) yang bersifat koordinasi dengan unsur Tingkat Kewilayaan (Kasatwil / Kapolres jajaran) yaitu dalam bentuk :
6. Kasatwil/Kapolres mengirim laporan segera setelah ada pengungkapan kasus tindak pidana korupsi;
7. Kasatwil/Kapolres mengirim Laporan Bulanan dan Tahunan secara periodik tentang hasil penindakan terhadap tindak pidana korupsi;
8. Berkoordinasi dalam memberikan bimibingan teknis dalam rangka Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidanan korupsi;
9. Subdit Tipidkor mengirimkan Petunjuk dan arahan berupa Surat maupun Surat Telegram;
10. Memberikan back up kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi kepada kewilayaan, apabila mengalami kendala/ hambatan.

**3. Hubungan Lintas Sektoral**

Hubungan lintas sektoralSubdit Tipikor dengan instansi pemerintah lainnya (Non Polri) yang sifatnya koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas atau merupakan tugas bersama sebagai berikut :

**a. Dengan Kejaksaan Tinggi / Negeri**

1) mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;

2) mengajukan permohonan perpanjangan penahanan apabila masa perpanjangan sudah habis dan memerlukan perpanjangan untuk proses penyidikan;

3) pengiriman berkas perkara;

4) apabila berkas perkara belum lengkap Kejaksaan mengeluarkan P19

apabila lengkap Kejaksaan mengeluarkan P21

5) Pengiriman Tsk dan BB (tahap II)

/b. Dengan Pengadilan Negeri…

|  |  |
| --- | --- |
| 18 |  |

**b. Dengan Pengadilan Negeri**

mengajukan surat permintaan penetapan penggeledahan dan penyitaan terhadap BB yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan.

* 1. **Dengan BPK / BPKP RI**

Mengajukan permohonan audit investigasi, audit penghitungan kerugian keuangan negara dan permintaan keterangan ahli penghitungan kerugian keuangan negara.

* 1. **Dengan Inspektorat Prop. Kaltim dan Jajarannya**

Melakukan audit Investigasi berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada lingkungan SKPD nya.

Disamping hubungan eksternal tersebut Subdit Tipikor juga sering melaksanakan hubungan kerja dengan instansi diluar institusi Polri yang pada umumnya dilaksanakan dalam bentuk koordinasi yang membutuhkan informasi-informasi guna peningkatan kerja dan proses pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan Dalam pelaksanaan tugas Subdit III Dit Reskrimsus Polda Kaltim mempunyai hubungan kerja dengan instansi diluar Polri (Departemen, Badan dan BUMN, BUMD dll) tentang penyalah gunaan pengguna anggaran yang diduga diselewengkan yang merugikan negara.

**BAB IV**

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Hubungan Tata Cara Kerja Subdit Tipikor dan Satuan Fungsi perlu mempedomani hal-hal sebagai berikut :

1. setiap Kasubdit wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK)

2. setiap Kasubdit membuat hasil temuan pengawasan dan pengendalian untuk bahan laporan dan evaluasi;

3. pengawasan terhadap pelaksanaan HTCK dilakukan oleh :

a. pengawasan struktural yang dilakukan oleh Pimpinan setingkat diatas;

b. pengawasan secara fungsional HTCK dilakukan oleh Karo Rena

/4. Pengawasan..

|  |  |
| --- | --- |
| 19 |  |

4. pengawasan dilakukan secara periodik dan berkelanjutan oleh Direktur

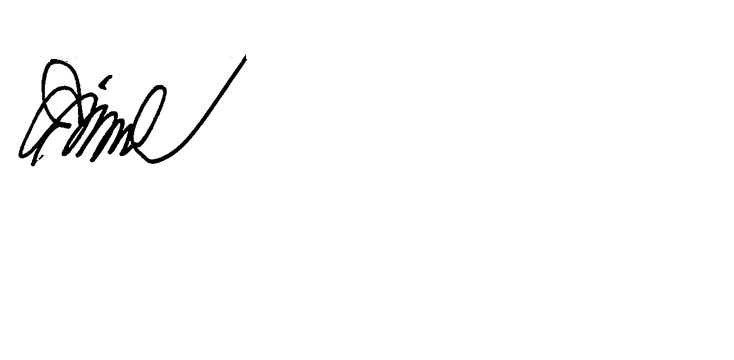
5. Setiap Kasubdit membuat evaluasi permasalahan yang timbul ataupun kendala dalam pelaksanaan HTCK

6. melakukan penyempurnaan dan perbaikan-perbainak terhadap HTCK

**BAB V  
PENUTUP**

Demikian HTCK Dit Reskrimsus Polda Kaltim ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas sebagai landasan yang mengatur mekanisme dan prosedur kerja serta manajemen pelaksanaan tugas bagi Penyidik di jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltim.

Hal-hal yang belum tercantum dalam HTCK ini akan diatur dan ditetapkan kemudian, sedang apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Balikpapan, September 2017

KASUBDIT TIPIDKOR

WINARDY, SH, SIK, MSi

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 76090775

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Daftar isi

BAB I : PENDAHULUAN

1. Umum ................................................................ 1

2. Dasar .................................................................. 2

3. Maksud dan tujuan ................................................................. 2

4. Ruang Lingkup ...................................................................... 3

5. Tata Urut ...................................................................................... 3

6. Pengertian .................................................................................... 3

BAB II : TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Unsur Pimpinan ........................................................................... 4
2. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf ......................... 5

BAB III : POKOK POKOK HTCK

1. Hubungan Internal ...................................................................... ..5

2. Hubungan Eksternal ...................................................................….7

3. Hubungan Lintas Sektoral ........................................................... 17

BAB IV : PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN …………………………..…… 18

BAB V : PENUTUP .......................................................................................... 19

|  |  |
| --- | --- |
| **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  **DAERAH KALIMANTAN TIMUR**  **DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS** |  |



**HUBUNGAN DAN TATA CARA KERJA**

**SUBDIT TIPIDKOR**

**DITRESKRIMSUS POLDA KALTIM**

Balikpapan, September 2017